

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sugijanto (2002) dalam Andriani (2010) peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks di pemerintahan tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mahmudi (2007;3) dalam Andriani (2010) Akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Meskipun demikian dalam kenyataannya pelaporan keuangan daerah masih banyak yang belum memenuhi standar pelaporan agar dapat digunakan oleh pengguna secara akuntabel. Laporan keuangan daerah tersebut seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan daerah.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah faktanya, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Indriasari, 2008)

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Kebermanfaatan (*usefulness*) sendiri merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai

terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi (Andriani,2010). Berdasarkan Pemdagri No 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Bab V pasal 5(2) bahwa penyajian laporan keuangan sebagaimana terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan, catatan atas laporan keuangan.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari (2008), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Maka dari permasalahan inilah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki tingkat pendidikan, kepelatihan dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diberikan.

Sumber daya manusia diukur dari tanggung jawab yang diberikan, tersebut diuraikan didalam *job description*. Dengan *job description* yang jelas dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam

menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangannya saja, tetapi diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada.

Menurut Husein (2003) dalam Primayana *et al* (2014) selain kualitas sumber daya yang baik, dalam pelaporan keuangan diperlukan pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, kebutuhan pengendalian internal menjadi salah satu pilar penting dalam pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga dan mengarahkan jalan suatu usaha agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program usaha dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif. Berdasarkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai.

Menurut Marda (2013) pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan keuangan sangat diperlukan dalam menentukan akuntabel dari sebuah data keuangan, dengan adanya pengawasan keuangan akan memberikan jaminan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang haruslah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah digariskan. Pengawasan akan melihat adanya ketidakwajaran entitas dalam pelaksanaan dan penyajian laporan keuangan, selain adanya pengawasan keuangan yang baik, dalam keterandalan laporan keuangan diperlukan adanya sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan.

Terakhir faktor penting dalam penelitian ini adalah adanya standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan, dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, maka prosedur pembuatan laporan keuangan terjadi keseragaman dalam penyajiannya. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria aset, kewajiban, penghasilan dan beban. (SAK-ETAP, 2013).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan.

Dengan hal itu peneliti membuat penelitian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta?
4. Apakah Pengawasan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta?
5. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta.
3. Menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta.
4. Menganalisis pengaruh Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta.
5. Menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun bagi lembaga pendidikan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan operasinya dalam memberikan pelaporan keuangan agar selalu melakukan prinsip kehati-hatian sehingga kinerjanya akan dianggap akuntabel oleh Pemerintah pusat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan publik dalam menentukan kebijakan yang bersifat menentukan kepercayaan analisa keuangan, dan sebagai bahan *review* di masa yang akan datang.
4. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian untuk mencari referensi keuangan yang bersifat dengan pelaporan keuangan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan daerah yaitu kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan laporan keuangan,

standar akuntansi pemerintahan. Serta mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keterandalan laporan keuangan, penelitian terdahulu dan hipotesis serta kerangka teori.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metodologi.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan.